

SOSIALISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI KAMPUNG PAWEKAMA DISTRIK WALESI KABUPATEN JAYAWIJAYA

Tukijan^{1*}, Ayu Anggraini Tambunan¹, Aswad Amir¹

¹Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Indonesia

*Correspondence e-mail: tukijan@unaim.ac.id

Artikel History

Dikirim : 01- 06-2024
Diterima: 05- 06-2024
Disetujui : 03- 07-2024
Dipublish: 07- 07-2024

Doi:

10.61924/insanta.v2i3.30

Abstrak

Di Kampung Pawekama, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, masyarakatnya menghargai warisan nilai-nilai sosial budaya melalui hubungan kekerabatan yang kuat. Meskipun begitu, dalam konteks pembangunan, mereka menuntut kebijakan publik yang pro-rakyat demi mencapai kesejahteraan. Namun, disayangkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap berbagai program pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masih kurang memadai. Tujuan dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemahaman menyeluruh tentang bagaimana masyarakat Kampung Pawekama memahami kebijakan publik yang bertujuan untuk kesejahteraan Kampung. Dengan menggunakan metode kualitatif dan penetapan informan secara sengaja, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Pawekama masih belum sepenuhnya memahami dan mengetahui berbagai kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, ditemukan bahwa sosialisasi kebijakan publik mengalami kendala karena faktor internal di unit-unit pemerintahan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program-program peningkatan kesejahteraan.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Pemahaman Masyarakat, Sosialisasi

Abstract

In Kampung Pawekama, Walesi District, Jayawijaya Regency, the community upholds the legacy of socio-cultural values through strong kinship relations. Nevertheless, within the context of development, they advocate for pro-people public policies to achieve prosperity. Unfortunately, it is regrettable that the community's understanding of various public service programs aimed at enhancing welfare remains inadequate. The objective of this Community Service Program (PKM) is to enhance the comprehensive

understanding of how the Kampung Pawekama community perceives public policies aimed at village welfare. Utilizing qualitative methods and purposive informant selection, this research aims to gather relevant data and information. The findings indicate that the Kampung Pawekama community still lacks a complete understanding and awareness of various public policies designed to enhance their welfare. Additionally, it was found that public policy socialization faces challenges due to internal factors within government units and a lack of community awareness regarding welfare improvement programs.

Keywords: *Public Policy, Community Understanding, Socialization*

PENDAHULUAN

Pedesaan di Indonesia tetap mempertahankan hubungan kekerabatan dan nilai-nilai sosial budaya peKampungan, meskipun telah terjadi kemajuan teknologi dan perkembangan wilayah yang meluas ke daerah Pedesaan. Masyarakat desa secara berulang-ulang berinteraksi dalam satuan sosial yang terorganisir (Koentjaraningrat, 2012). Menurut pandangan Ralph Linton, masyarakat desa adalah kelompok manusia yang bekerja sama untuk mengorganisasi diri mereka sendiri, sementara Herskovits menyatakan bahwa masyarakat desa adalah kelompok individu yang menyesuaikan diri dengan cara hidup tertentu sesuai dengan lingkungan mereka (Soekanto, 2017; Wiranata, 2011). Desa, atau istilah lainnya Kampung, sebagai tempat tinggal masyarakat yang relatif kecil, ditandai oleh ikatan kebersamaan di wilayah tertentu (Syarif & Zaenuddin, 2017). Bintarto menegaskan bahwa Kampung merupakan hasil dari interaksi manusia dengan lingkungannya, menciptakan sebuah entitas yang dipengaruhi oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berinteraksi satu sama lain (Wijayanti & Pratomo, 2019).

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan inisiatif dan prakarsa masyarakat, serta hak asal usul dan tradisional yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut, masyarakat desa dapat dipahami sebagai komunitas yang masih memegang teguh dan mewarisi nilai-nilai sosial budaya turun-temurun, dan mereka umumnya mendiami wilayah pedesaan yang terpencil dari perkotaan. Meskipun dianggap sulit untuk berkembang karena cenderung mempertahankan tradisi yang dianggap tidak produktif, masyarakat pedesaan memiliki kekuatan dalam memelihara nilai-nilai tradisional sebagai fondasi bagi kehidupan masyarakat yang harmonis (Susanto, 2009).

Menurut pandangan Soemardjan (1993) sebagaimana yang dikutip oleh Roso (2019), masyarakat pedesaan sering dianggap sebagai pemegang tradisi yang kokoh, memelihara nilai-nilai budaya secara turun-temurun sebagai pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tradisional, menurutnya, cenderung memiliki keseragaman dalam pemahaman nilai-nilai, serta memiliki keakraban, solidaritas, dan kesadaran kolektif yang kuat, yang diwujudkan melalui aturan-aturan adat yang berfungsi menjaga keteraturan sosial. Di Kampung Pawekama, Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, situasinya pun mirip, menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan masyarakat pedesaan yang sering dikaji dalam lingkup akademis.

Memperhatikan karakteristik masyarakat desa yang telah disebutkan, penting bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kondisi sosial budaya di dalamnya saat merumuskan kebijakan publik. Pemerintahan di tingkat daerah bertugas mengatur dan mengelola masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, atau politik. Efektivitas pemerintahan dapat tercermin dari kemampuannya dalam memberikan kesejahteraan melalui kebijakan publik yang adil bagi seluruh warga, tanpa pandang bulu. Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat Kampung (Sunarno, 2012). Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal sangat terkait dengan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik haruslah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kebijakan publik tidak seharusnya ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan pribadi pejabat pemerintah.

Essensi dari kebijakan publik adalah penerapan yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk di lingkungan Kampung, yang seharusnya memiliki pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku. Kebijakan publik merujuk pada segala keputusan yang memengaruhi kepentingan masyarakat secara umum. Thomas R. Dye menggambarkan bahwa kebijakan publik mencakup semua langkah yang dipilih dan dilaksanakan oleh pemerintah (Kencana, 2016). Sebagai pelaksana kebijakan publik, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pemerintah setempat bertanggung jawab untuk memahami bahwa dampak dari kebijakan publik dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di perkampungan. Khususnya dalam konteks otonomi daerah, kebijakan publik di tingkat kabupaten harus dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kampung (Lesmana, 2017). Kebijakan publik menjadi langkah konkrit yang diambil oleh aparat negara untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di tengah masyarakat (Anderson, 2003). T.B. Smith menekankan bahwa kebijakan publik harus dapat dijalankan dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan awal, menunjukkan bahwa kebijakan memiliki sasaran yang jelas dan

diwujudkan melalui program-program yang konkret. (Akib, 2010). Implementasi kebijakan harus merata, termasuk di wilayah perkampungan yang seringkali terpencil dan sulit dijangkau secara geografis.

Mendukung masyarakat Kampung melalui kebijakan publik dapat menciptakan dukungan positif terhadap program pemerintah (Winarno, 2012), meskipun pelaksanaannya mungkin menimbulkan kritik jika terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas. Dalam konteks tersebut, kritik yang diajukan oleh masyarakat harus dianggap sebagai masukan berharga bagi peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan. Kebijakan publik melibatkan regulasi, tindakan, dan alokasi anggaran terkait program-program yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga perwakilannya (Evans, 2008). Kendala dalam implementasi kebijakan publik seringkali disebabkan oleh faktor internal di unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. Akibatnya, masyarakat Kampung bisa menjadi tertinggal dalam memahami kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan. Tidak konsistennya interpretasi aturan pelayanan publik antar unit kerja yang berwenang juga menjadi salah satu hambatan dalam memberikan layanan yang merata kepada masyarakat.

Selain itu, berbagai kebijakan publik seringkali tidak disosialisasikan dan tersebar dengan cepat di kalangan masyarakat Kampung. Kurangnya koordinasi yang berkelanjutan antar unit kerja yang bertanggung jawab atas kebijakan publik membuat informasi sulit untuk sampai ke Kampung-Kampung. Di samping itu, koordinasi yang terbatas antara unit kerja di tingkat kabupaten dengan pemerintahan Kampung juga menyebabkan pelaksanaan kebijakan publik terhambat dan tidak berjalan lancar. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat dua masalah: (1) Apakah masyarakat Kampung telah mengetahui berbagai kebijakan publik terkait kesejahteraan yang diterapkan oleh pemerintah daerah maupun pusat? (2) Apakah upaya sosialisasi kebijakan publik oleh pemerintah daerah mengalami kendala karena faktor internal di unit-unit kerja pemerintahan daerah? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang sejauh mana masyarakat Kampung memahami kebijakan publik yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

METODE

Penelitian tentang kebijakan publik di Kampung Pawekama mengusung pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam konteks hubungan manusia serta interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna-makna yang terkandung dalam interaksi tersebut serta melihatnya dari berbagai

sudut pandang yang relevan. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (sebagaimana dikutip dalam Moleong, 2018), penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati beserta perilaku mereka. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konteks, nilai, dan norma yang melandasi interaksi antara berbagai pihak terkait dengan kebijakan publik di Kampung Pawekama.

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat meliputi catatan lapangan, rekaman audio, video, serta informasi daring dari berbagai situs web, media online, dan sumber data digital lainnya (Bungin, 2016). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendetail tentang berbagai aspek yang relevan dengan kebijakan publik di kampung tersebut. Dengan demikian, pendekatan kualitatif menjadi landasan yang kuat dalam penelitian ini, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menginterpretasikan kompleksitas interaksi sosial dan dinamika kebijakan publik di Kampung Pawekama dengan lebih baik.

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung Pawekama, dengan informan penelitian yang dipilih secara sengaja. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei di Kampung Pawekama, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian, dipilih informan penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan pola snowball. Teknik purposive sampling dengan snowball digunakan untuk mengidentifikasi informan atau narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2016). Terdapat 9 informan yang terpilih melalui metode snowball, dengan kriteria bahwa mereka adalah warga Kampung Pawekama, berusia minimal 25 tahun, memiliki pendidikan setidaknya lulus Sekolah Dasar, dan telah tinggal di Kampung tersebut selama minimal lima tahun berturut-turut. Kriteria usia dan masa tinggal tersebut dianggap memadai untuk memberikan wawasan yang cukup tentang kondisi dan dinamika perkembangan Kampung dari sudut pandang kesejahteraan. Informan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai A, B, C, D, E, F, G, H, dan I.

Selain teknik pengumpulan data yang mencakup observasi, dokumentasi, wawancara, dan sumber non-manusia seperti dokumen dan rekaman (Faisal, 2015), penelitian ini juga mengutamakan fokus pada kebijakan publik yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kampung (Patarai, 2020). Proses analisis data dilakukan dengan menyusun berbagai informasi menjadi kelompok deskripsi yang relevan. Data dan informasi yang tidak berhubungan langsung dengan topik penelitian akan dieliminasi, sehingga hasil analisis tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan penelitian dalam menggambarkan peristiwa secara komprehensif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa

hasil analisis tidak menyimpang dan tetap konsisten dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Kampung Pawekama secara umum menggantungkan penghasilannya dari sektor pertanian, namun dalam skala kecil yang belum menjamin kehidupan sejahtera. Mayoritas penduduk menggeluti profesi sebagai buruh tani atau petani pemilik lahan sempit, dengan peralatan sederhana dan cakupan hasil panen yang terbatas. Dalam kondisi ekonomi yang kurang sejahtera ini, masyarakat Kampung cenderung kurang peduli terhadap berbagai program pembangunan perkampungan yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap berbagai kebijakan publik, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terfokus pada program-program yang diselenggarakan di Kampung Pawekama. Hal ini merupakan temuan utama yang didasarkan pada pendapat mayoritas informan yang diwawancarai. Kesimpulan ini diperkuat oleh konsistensi pendapat dari sebagian besar informan, yang diungkapkan oleh lima dari sembilan orang yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini.

Hasil dari distribusi kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kampung Pawekama belum memahami secara mendalam berbagai program pemerintah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan. Mereka cenderung mengetahui program-program tersebut hanya jika menjadi topik pembicaraan utama di kalangan warga Kampung. Informasi tentang program-program tersebut diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui komunikasi langsung maupun melalui media massa seperti radio, televisi, dan media sosial. Fenomena ini sesuai dengan konsep opini publik yang menggambarkan bahwa pengetahuan masyarakat terbentuk melalui proses komunikasi yang dinamis, di mana aliran informasi memainkan peran kunci. Oleh karena itu, program-program pemerintah yang dikenal oleh masyarakat Kampung umumnya adalah yang sering dibicarakan dan menjadi perhatian utama di lingkungan perkampungan.

Lebih lanjut, pengetahuan masyarakat terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan, seperti bantuan pendidikan bagi siswa sekolah negeri dan kesejahteraan guru, hampir merata di kalangan warga Kampung. Hal ini karena program-program tersebut telah menjadi klise dan sering muncul dalam pidato-pidato elite di perkampungan. Selain itu, janji-janji terkait dengan pendidikan gratis dan perhatian terhadap kesejahteraan guru sering kali menjadi sorotan utama dalam pemilihan anggota legislatif, termasuk di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

Program-program kesejahteraan yang tidak diketahui secara jelas oleh masyarakat Kampung Pawekama pada umumnya adalah yang berkaitan dengan kegiatan spesifik yang

menyangkut kelompok masyarakat tertentu, seperti kesejahteraan bagi warga disabilitas dan lansia. Pengetahuan mereka sebatas pada pengalaman melihat adanya sumbangan untuk orang lanjut usia, tetapi tidak mengetahui dengan pasti apakah itu diselenggarakan oleh pemerintah atau oleh kelompok masyarakat lain yang memiliki status sosial ekonomi lebih baik.

Namun, yang cukup mengherankan adalah ketidaktahuan mereka terhadap upaya pengembangan wisata kampung atau desa wisata, mengingat Kampung Pawekama adalah kawasan pegunungan yang memiliki potensi wisata yang baik. Kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Sunaryo (2014), yang menyatakan bahwa pengorganisasian kesejahteraan masyarakat dalam kebijakan publik hanya dihubungkan dengan kinerja organisasi pemerintah secara normatif. Namun, aspek pelaksanaan kebijakan publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat untuk menerima pelayanan dari pemerintah sering kali terabaikan.

Masyarakat Kampung Pawekama, seperti masyarakat di tempat lain di seluruh Indonesia, memiliki hak moral dan material yang sama dalam implementasi kebijakan publik untuk mencapai kesejahteraan. Menurut David Easton, kebijakan publik adalah serangkaian upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah beserta unit-unit organisasinya untuk kepentingan publik atau masyarakat. Pencapaian kesejahteraan rakyat juga diamanatkan dalam berbagai peraturan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahiriah dan batiniah, mendapatkan tempat tinggal yang layak, lingkungan hidup yang baik, pelayanan kesehatan, kesempatan yang sama dalam proses peradilan, serta berbagai hak lain yang terkait dengan posisi warga negara Indonesia.

Namun, di tingkat perkampungan, pemenuhan hak-hak tersebut sering kali terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan model perencanaan Kampung yang efektif untuk mencapai kesejahteraan di tingkat Kampung. Hakikatnya, pencapaian kesejahteraan masyarakat Kampung melalui kebijakan publik harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan efektif.

Sosialisasi kebijakan publik menyangkut kesejahteraan

Kebijakan publik memiliki tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah dan aparatur pejabat pemerintah dengan maksud memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat mengandung unsur kebaikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah, sebagaimana diutarakan oleh Muliawaty & Hendryawan (2020), seharusnya tidak memosisikan diri sebagai pihak yang dominan, melainkan sebagai pelayan masyarakat. Namun, masyarakat Kampung, terutama yang berada di wilayah terpencil yang

jauh dari pusat pemerintahan di tingkat Kabupaten, belum sepenuhnya merasakan manfaat nyata dari berbagai program pemerintah yang sebenarnya menjadi hak mereka untuk dinikmati. Meskipun ada kebijakan publik yang sangat dikenal oleh masyarakat Kampung Pawekama, namun ada juga program pemerintah yang belum sepenuhnya diketahui oleh mereka.

Masyarakat Kampung Pawekama merasa bahwa mereka hanya mendengar kabar yang tidak utuh atau hanya mendapatkan informasi yang tidak lengkap. Selain itu, mereka juga merasakan bahwa program-program tersebut belum terwujud sepenuhnya di Kampung Pawekama. Namun, sebenarnya ketidaktahuan masyarakat bukan hanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi program yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kali, ketidaktahuan ini juga disebabkan oleh sikap masyarakat yang cenderung tidak mau tahu, apatis, dan lamban dalam menerima informasi serta merespons himbauan atau ajakan untuk berpartisipasi dalam program-program kesejahteraan Kampung. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih aktif dan menyeluruh baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat Kampung.

Kondisi yang diamati tersebut jelas berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sibubur, Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara (Elvina & Musdhalifah, 2019). Dalam konteks ini, program-program kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari implementasi kebijakan anggaran dana Desa, yang juga melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan aparat pemerintah Desa. Sebagaimana disampaikan oleh Elvina & Musdhalifah (2019), esensi dari kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung hanya dapat terwujud apabila terdapat dukungan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan keberadaan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di lingkungan tersebut.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala dalam penerapan kebijakan yang ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, terutama di Kampung Pawekama. Salah satu aspek yang sangat mencolok adalah keterlambatan dalam penyebaran informasi kepada warga Kampung. Kendala lainnya meliputi kompleksitas program yang melibatkan berbagai unit kerja di lingkungan pemerintah serta sikap lamban masyarakat dalam merespons program-program pemerintah. Bahkan, dalam pelaksanaan kegiatan pun dapat muncul kelompok kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Namun, perlu dicatat bahwa faktor tersebut tidak terlalu menonjol di Kampung karena semangat kolektivitas warga Kampung yang sangat baik dalam menjaga kebersamaan dan mendukung kepentingan bersama. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas

kebijakan publik di tingkat Kampung, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait untuk mengatasi berbagai kendala dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampung secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik di Kampung Pawekama sangat beragam. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam penyebaran informasi terkait program pemerintah. Meskipun demikian, warga Kampung telah mampu mendapatkan informasi lebih awal melalui berbagai sumber yang dipercaya, terutama melalui interaksi antarwarga di lingkungan Kampung. Kehadiran perangkat teknologi komunikasi juga mempermudah akses informasi, terutama bagi kalangan anak muda yang cenderung lebih akrab dengan teknologi tersebut. Meskipun tidak semua warga memiliki akses ke perangkat teknologi canggih, seperti telepon seluler, mereka tetap dapat dengan mudah mendapatkan informasi melalui interaksi sosial yang erat di perkampungan, di mana berbagi informasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Hal ini sejalan dengan teori teknologi komunikasi yang diperkenalkan oleh E. Rogers, yang menekankan bahwa teknologi memiliki potensi untuk memberikan akses informasi kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan mereka (Badri, 2017). Namun, selain keterlambatan informasi, hambatan lain yang dihadapi adalah faktor birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai unit kerja di pemerintahan daerah. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam implementasi program, yang pada gilirannya membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk merasakan manfaat dari program-program kesejahteraan yang dijanjikan. Meskipun penelitian Fahturrahman (2016) tentang Birokrasi dan Implementasi Kebijakan Publik di Banten menunjukkan bahwa birokrasi secara umum mendukung kelancaran implementasi kebijakan publik, namun tampaknya di Kampung Pawekama terdapat kendala dalam koordinasi antarunit kerja pemerintahan yang memperlambat pelaksanaan program-program tersebut. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi dan efisiensi birokrasi perlu menjadi fokus dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan publik di tingkat perkampungan.

Namun, situasi di Kampung Pawekama menunjukkan bahwa birokrasi menjadi salah satu hambatan utama dalam kelancaran implementasi kebijakan publik. Disamping itu, lambannya respon masyarakat Kampung terhadap program-program kesejahteraan juga turut mempengaruhi tercapainya kesejahteraan. Penelitian lain yang dilakukan di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat Kampung adalah seringnya pergantian perangkat desa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan di desa (Mulyadi, 2019). Sementara di Kampung Pawekama, warga Kampung

mengungkapkan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sering kali disampaikan dalam berbagai pertemuan di perkampungan oleh elit Kampung, namun realisasi dari upaya tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Meskipun beberapa kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat telah diterapkan, namun lambannya respons dan sikap skeptis yang ditunjukkan oleh masyarakat Kampung sebagian besar dipengaruhi oleh pengalaman mereka sendiri dalam urusan kesejahteraan.

Faktor lain yang menjadi hambatan, meskipun tidak terlalu menonjol, adalah pelaksanaan kebijakan publik terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sering dimanfaatkan oleh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan pribadi dalam memperoleh keuntungan. Selain itu, tidak jarang berbagai bentuk bantuan untuk kesejahteraan warga Kampung dikaitkan dengan upaya untuk memperoleh dukungan dalam persaingan di antara mereka yang memiliki kepentingan. Oleh karena itu, pemahaman akan kebijakan publik dan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam pelaksanaannya menjadi kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

SIMPULAN

Pemahaman masyarakat Kampung terhadap kebijakan publik masih terbatas pada program pemerintah yang populer dan sering menjadi pembicaraan di kalangan mereka. Namun, kebijakan publik lain yang berupaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam konteks yang lebih terbatas atau di luar jangkauan pemikiran masyarakat, seperti kegiatan budaya lokal, pemberdayaan warga lanjut usia, peningkatan aksesibilitas bagi difabel, tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung, serta pengembangan potensi wisata bahari, sering kali tidak diketahui atau dirasakan secara signifikan oleh warga Kampung setempat.

Sosialisasi kebijakan publik yang menekankan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat atau memberikan pelayanan publik yang lebih baik tidak dilakukan secara rutin. Hal ini terutama disebabkan oleh berbagai hambatan, termasuk kelambatan dalam penyebaran informasi, pelaksanaan program yang terhambat oleh birokrasi, respons masyarakat yang kurang memadai, dan munculnya kepentingan kelompok yang berupaya memanfaatkan program pemerintah untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan publik yang berpotensi memberikan dampak positif bagi kesejahteraan Kampung perlu ditingkatkan secara signifikan.

Penting bagi aparaturnya pemerintahan Kampung untuk menjalin hubungan yang integratif dengan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Hal ini bertujuan agar semua kebijakan publik yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kampung,

seperti di Kampung Pawekama, dapat diketahui, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Di sisi lain, aparat pemerintah di tingkat Distrik Walesi dan Kabupaten Jayawijaya juga seharusnya aktif dalam memperhatikan Kampung-Kampung yang relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.

Upaya sosialisasi terhadap kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan dan terjadwal. Dengan adanya sosialisasi yang berkesinambungan, hambatan terkait keterlambatan informasi dapat diatasi. Selain itu, proses perijinan yang melibatkan koordinasi antar unit di pemerintahan juga perlu disederhanakan untuk mempercepat implementasi kebijakan.

Jika langkah-langkah tersebut dilakukan dengan baik, maka masyarakat juga akan lebih responsif terhadap program pemerintah. Selain itu, pihak-pihak yang berupaya mencari keuntungan pribadi akan kehilangan peluang, karena semua kegiatan akan dilaksanakan dengan cepat dan terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, kolaborasi yang erat antara pemerintahan Kampung, Kecamatan, dan Kabupaten sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung secara menyeluruh.

SARAN

Analisis perilaku masyarakat menunjukkan perlunya penelitian lanjut untuk mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana masyarakat menerima dan merespons kebijakan publik. Budaya lokal, struktur sosial, dan pola komunikasi menjadi fokus utama dalam memahami mengapa ada ketidaktahuan atau kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik. Studi tentang keterlambatan informasi menyoroti pentingnya meneliti alasan di balik penundaan penyebaran informasi terkait program-program pemerintah di Kampung Pawekama. Infrastruktur komunikasi, jaringan informasi lokal, dan kebijakan komunikasi pemerintah dapat dieksplorasi untuk mencari solusi yang lebih efektif. Analisis biaya manfaat kebijakan publik diperlukan untuk memahami manfaat konkret yang dirasakan masyarakat dari kebijakan yang ada, memberikan wawasan lebih dalam tentang efektivitas program-program dalam meningkatkan kesejahteraan di kampung. Pengaruh kepentingan pribadi dalam implementasi kebijakan juga perlu diteliti lebih lanjut untuk mengungkap dinamika politik lokal, struktur kekuasaan, dan konflik kepentingan yang mungkin menghambat kesuksesan program kesejahteraan. Evaluasi efisiensi birokrasi di tingkat kampung juga penting, melibatkan analisis struktural dan prosedural serta identifikasi hambatan-hambatan yang menghambat pelaksanaan kebijakan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak tidak hanya memperkuat nilai-nilai kerjasama, tetapi juga menjadi landasan kokoh bagi kesuksesan pengabdian ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam mewujudkan visi dan misi pengabdian ini. Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat. (2012). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan: Studi tentang Kebudayaan dengan Pendekatan Antropologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wiranata, I. G. A. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Implementasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarif, M., & Zaenuddin. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Wijayanti, S., & Pratomo, D. (2019). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Susanto, A. (2009). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Prenada Media.
- Soemardjan. (1993). *Sistem Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Roso. (2019). *Kebijakan Publik: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sunarno. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Lesmana, I. W. (2017). *Politik Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Prenada Media.
- Kencana, E. (2016). *Kebijakan Publik Lokal: Pemikiran dan Implementasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anderson, J. (2003). *Public Policy Making*. London: Routledge.
- Akib, M. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Metodologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Pengertian, Proses, dan Permasalahan*. Yogyakarta: CAPS.
- Evans, M. (2008). *Understanding Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bungin, B. (2016). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Faisal. (2015). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS.
- Patarai, D. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Yogyakarta: Deepublish.
- Sunaryo. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: Kencana.
- Muliawaty, S., & Hendryawan. (2020). Kebijakan Publik: Strategi Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta: CAPS.
- Elvina, A., & Musdhalifah. (2019). Teori Kebijakan Publik: Perspektif Interdisipliner. Jakarta: Prenada Media.
- Badri. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahturrahman. (2016). Analisis Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Implementasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. (2019). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.